



BerAKHLAK  **bangga**
melayani
bangsa
Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten
Harmonis Loyal Adaptif Kolaboratif

RENCANA KERJA PERUBAHAN TAHUN 2024

"KECAMATAN TEBING TINGGI KABUPATEN BALANGAN"



KATA PENGANTAR

Dengan memanjatkan Puji dan Syukur kehadirat Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa, Rencana Kerja Perubahan (Renja-P) Kecamatan Tebing Tinggi Tahun 2024 dapat disusun.

Rencana Kerja Perubahan (Renja-P) Kecamatan Tebing Tinggi Tahun 2024 disusun dalam rangka memenuhi ketentuan Undang-Undang No. 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional/SPPN dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tatacara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tatacara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah serta Tatacara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

Dokumen Rencana Kerja Perubahan (Renja-P) Kecamatan Tebing Tinggi Tahun 2024, nantinya akan menjadi acuan dalam menyusun Rencana Kerja dan Anggaran Perubahan Tahun 2024. Serta diharapkan dapat dijadikan pedoman oleh seluruh Aparatur Kecamatan Tebing Tinggi dalam melaksanakan tugas dan fungsinya.

Kami menyadari bahwa Penyusunan Rencana Kerja Perubahan (Renja-P) Kecamatan Tebing Tinggi Tahun 2024 ini masih belum sempurna, kritik dan saran untuk penyempurnaan Rencana Kerja Perubahan (Renja-P) ini tentunya sangat diharapkan untuk kemajuan di masa yang akan datang.

Tebing Tinggi, 01 Juli 2024

CAMAT TEBING TINGGI



NORSAMIDI, S.Kep

NIP. 19720606 199202 1 001

DAFTAR ISI

	Halaman
KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Landasan Hukum	6
C. Maksud dan Tujuan	8
D. Sistematika Penulisan	9
BAB II EVALUASI RENJA SAMPAI TRIWULAN II TAHUN 2024	10
BAB III RENCANA PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN DALAM PERUBAHAN RENCANA KERJA	22
A. Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan serta Perubahannya	22
B. Dampak Sosial Ekonomi	36
BAB IV PENUTUP	41

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Ada perbedaan Indikator Kinerja Utama (IKU) pada Rencana Kerja (Renja) Tahun 2024 dengan Perjanjian Kinerja (PK) Tahun 2024 dan Rencana Kerja (Renja) Perubahan 2024. Indikator Kinerja Utama (IKU) pada Rencana Kerja (Renja) Tahun 2024 hanya ada 1 (satu) dan merupakan Indikator dari Tujuan SKPD. Yang menjadi penyebab dari tersebut adalah, bahwa penyusunan Rencana Kerja (Renja) Tahun 2024 dilakukan sebelum Pohon Kinerja dan Cascading Kecamatan Terbaru selesai disusun. Namun pada Rencana Kerja (Renja) Perubahan 2024, Indikator Kinerja Utama (IKU) sudah selaras dengan Perjanjian Kinerja (PK) Tahun 2024 dan merupakan Sasaran SKPD.

Rencana Kerja Perubahan (Renja-P) adalah Dokumen Perencanaan Perubahan yang memuat Kebijakan, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan serta Kebutuhan Anggaran Indikatif Sub Kegiatan. Mendukung terwujudnya Good Governance, dalam hal ini pertanggungjawaban pemerintah dalam mewujudkan Tata Pengelolaan Pemerintahan yang baik. Salah satunya adalah mewujudkan pemerintahan yang berorientasi pada hasil (Result Oriented Government). Dengan kata lain pemerintah lebih berfokus pada pencapaian kinerja yang lebih baik.

Kecamatan Tebing Tinggi merupakan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di Kabupaten Balangan yang mempunyai tugas melaksanakan Urusan Pemerintahan Daerah sesuai Peraturan Bupati Balangan Nomor 55 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 107 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat

Daerah. Agar pelaksanaan tugas yang telah digariskan berjalan dengan efektif dan terarah, maka Penyusunan dan Penetapan Rencana Kerja Perubahan (Renja-P) menjadi mutlak, yaitu menjadi pedoman di Lingkungan Perangkat Daerah dalam menyusun Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Prioritas Perangkat Daerah pada Tahun Anggaran berkenaan.

Selanjutnya, dari sisi dinamika Penyelenggaraan Pemerintah Daerah, beberapa perubahan kebijakan juga perlu diambil terkait upaya-upaya pencapaian Target-Target RPJMD Kabupaten Balangan Tahun 2021-2026, khususnya Target Indikator Kinerja Daerah pada Tahun 2024. Dengan adanya perubahan kebijakan dari Pemerintah Kabupaten Balangan yang harus disesuaikan, serta untuk menyempurnakan perencanaan agar bisa dilaksanakan dengan maksimal, maka kiranya perlu dilakukan Perubahan atas Rencana Kerja Kecamatan Tebing Tinggi Tahun 2024.

Dokumen Rencana Kerja Perubahan (Renja-P) Kecamatan Tebing Tinggi Tahun 2024 ini disusun untuk menjadi Pedoman Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Perubahan Kecamatan Tebing Tinggi, yang kemudian akan dituangkan dalam Rancangan APBD (RAPBD) Perubahan Kabupaten Balangan Tahun 2024.

Penyusunan Rencana Kerja Perubahan (Renja-P) Kecamatan Tebing Tinggi dimulai dari usulan setiap Seksi atau PPTK dan juga dari Sekretariat, kemudian menganalisis gambaran pelayanan Kecamatan Tebing Tinggi untuk menentukan isu-isu penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi SKPD sehingga perumusan tujuan dan sasaran yang dihasilkan berdasarkan Review Hasil Evaluasi Rencana Kerja Murni SKPD yakni dari Bulan Januari sampai dengan Bulan Juni Tahun 2024.

Dalam mewujudkan visi dan misi serta mencapai tujuan, maka Kecamatan Tebing Tinggi menetapkan Sasaran Kinerja

yang merupakan acuan atau pedoman yang digunakan untuk mencapai tujuan. Sedangkan Indikator Kinerja Utama (IKU) merupakan suatu parameter yang digunakan untuk mengukur tingkat ketercapaian terhadap suatu sasaran.

Pencapaian IKU Kecamatan Tebing Tinggi sampai dengan Bulan Juni Tahun 2024 ditunjukkan oleh tabel berikut ini.

**Pengukuran Indikator Kinerja Utama (IKU) Kecamatan
Tebing Tinggi sampai dengan Bulan Juni Tahun
2024**

SASARAN	INDIKATOR	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
Meningkatnya Fasilitasi Pelayanan Masyarakat	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Pelayanan dan Kesejahteraan Sosial	84	87.67	104.37 %
Meningkatnya Fasilitasi Pemberdayaan Masyarakat	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan Desa (LKD) yang Aktif	60	30	50%
Meningkatnya Ketentraman dan Ketertiban Umum di Wilayah Kecamatan	Persentase Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum yang Ditangani	100%	100%	100%
Meningkatnya Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	Persentase Desa yang Tertib Administrasi Pemerintahan	100%	100%	100%
	Persentase Desa yang Tertib Administrasi Keuangan	100%	100%	100%

Adapun Formulasi Perhitungan dari Indikator Kinerja Utama (IKU) sebagaimana di atas, adalah sebagai berikut.

**FORMULASI PERHITUNGAN INDIKATOR KINERJA UTAMA
(IKU)**

NO	INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)	FORMULASI PERHITUNGAN
1	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Pelayanan dan Kesejahteraan Sosial	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Pelayanan dan Kesejahteraan Sosial
2	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan Desa (LKD) yang Aktif	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan Desa (LKD) yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa
3	Persentase Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum yang Ditangani	Jumlah Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum yang Tertangani Dibagi Jumlah Kasus yang Terjadi Dikali 100%
4	Persentase Desa yang Tertib Administrasi Pemerintahan	Jumlah LPPD dan Laporan Kinerja BPD yang Disampaikan Seluruh Desa Dibagi 2 (Dua) Laporan Per Desa Dikali 100%
5	Persentase Desa yang Tertib Administrasi Keuangan	Jumlah Laporan Keuangan yang Disampaikan Seluruh Desa Dibagi 2 (Dua) Laporan Per Desa Dikali 100%

Adapun Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan yang mendukung Pencapaian Indikator Kinerja Utama (IKU) sebagaimana di atas, berikut Jumlah Pagu dan Realisasi Pagu sampai dengan Bulan Juni 2024 (Semester I), adalah sebagai berikut :

PROGRAM/KEGIATAN/SUBKEGIATAN YANG Mendukung Indikator Kinerja Utama (IKU) Beserta Pagu dan Realisasinya Sampai Dengan Bulan Juni 2024

NO	INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	PAGU	REALISASI	PERSENTASE
01	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Pelayanan dan Kesejahteraan Sosial	PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	65.979.000,00	29.400.000,00	45%
		Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	65.979.000,00	29.400.000,00	
		Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	65.979.000,00	29.400.000,00	
02	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan Desa (LKD) yang Aktif	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	383.382.300,00	110.265.000,00	29%
		Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	267.222.700,00	71.385.000,00	
		Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	267.222.700,00	71.385.000,00	
		Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan	116.159.600,00	38.880.000,00	
		Penumbuhan dan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Keterlibatan Perencanaan Kehidupan Menuju Keluarga Berkualitas	116.159.600,00	38.880.000,00	
03	Persentase Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum yang Ditangani	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	67.910.000,00	26.179.100,00	36%
		Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman	67.910.000,00	26.179.100,00	
		Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	67.910.000,00	26.179.100,00	
		PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	243.147.200,00	69.400.200,00	29%
		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	243.147.200,00	69.400.200,00	
		Pelaksanaan Semua Urusan Pemerintahan yang Bukan Merupakan Kewenangan Daerah dan Tidak Dilaksanakan oleh Instansi Vertikal	243.147.200,00	69.400.200,00	
04	Persentase Desa yang Tertib Administrasi Pemerintahan Persentase Desa yang Tertib Administrasi Keuangan	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	327.993.300,00	75.049.100,00	23%
		Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	327.993.300,00	75.049.100,00	
		Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	250.145.700,00	42.949.100,00	
		Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Partisipatif	77.847.600,00	32.100.000,00	

B. Landasan Hukum

Peraturan Perundang-Undangan menjadi dasar dalam Penyusunan Rencana Kerja Perubahan (Renja-P) Kecamatan Tebing Tinggi Tahun 2024 adalah sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 2286);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5567);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan atas

- Peraturan Menteri Dalam negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tatacara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tatacara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah serta Tatacara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Perubahan Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1312);
 7. Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 10 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Balangan Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Balangan Tahun 2010 Nomor 87);
 8. Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 24 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Daerah Kabupaten Balangan Tahun 2013-2032 (Lembaran Daerah Kabupaten Balangan Tahun 2013 Nomor 24, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Balangan Nomor 95);
 9. Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 02 Tahun 2018 tentang Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Balangan Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Balangan Tahun 2018 Nomor 2);
 10. Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 5 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2021-2026;
 11. Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 2 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan

Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Balangan Tahun 2023 Nomor 3, Noreg. (3-38/2023) Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 3 Tahun 2023);

12. Peraturan Bupati Balangan Nomor 55 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Balangan Nomor 107 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah (Berita Daerah Kabupaten Balangan Tahun 2023 Nomor 55).

C. Maksud dan Tujuan

a. Maksud

1. Mewujudkan Sinergitas dan Singkronisasi Pelaksanaan Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan dengan Pengalokasian Anggaran secara Efektifitas dan Efisiensi sehingga menunjang Visi dan Misi Kepala Daerah.
2. Memberikan arahan dan pedoman bagi seluruh aparatur pada Kecamatan Tebing Tinggi dalam melaksanakan tugasnya, sehingga Sasaran dan Target Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan yang telah ditetapkan untuk Tahun Anggaran 2024 dapat berjalan sesuai dengan kebijakan dan petunjuk.
3. Memberikan informasi kepada Pemangku Kepentingan (*Stakeholder*) tentang Rencana Kerja Perubahan (Renja-P) Kecamatan Tebing Tinggi.
4. Mempermudah Pengendalian, Monitoring, Evaluasi dan Koordinasi Pelaksanaan Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan pada Tahun 2024.
5. Memberikan pedoman dalam rangka Pelaksanaan Tugas Pokok dan Fungsi pada masing-masing Seksi dan Sub Bagian pada Lingkungan Kecamatan Tebing Tinggi.

b. Tujuan

Tujuan yang ingin dicapai dalam Penyusunan Rencana Kerja Perubahan (Renja-P) Kecamatan Tebing Tinggi Tahun 2024 ini adalah, sebagai Penyempurnaan Rencana Kerja Kecamatan Tebing Tinggi Tahun 2024. Perubahan Renja disusun untuk menyesuaikan Perubahan Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan SKPD yang telah ditetapkan karena perubahan kondisi dan permasalahan yang dihadapi.

D. Sistematika Penulisan

Dokumen Rencana Kerja Perubahan (Renja-P) Kecamatan Tebing Tinggi terdiri dari 4 (empat) Bab dengan Sistematika Penulisan sebagai berikut :

BAB I : PENDAHULUAN

- A. Latar Belakang
- B. Landasan Hukum
- C. Maksud dan Tujuan
- D. Sistematika Penulisan

BAB II : EVALUASI RENJA SAMPAI TRIWULAN II TAHUN 2023

BAB III : RENCANA PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN DALAM PERUBAHAN RENCANA KERJA

BAB IV : PENUTUP

BAB II

EVALUASI RENJA SAMPAI TRIWULAN II TAHUN 2024

Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja (Renja) Kecamatan Tebing Tinggi diukur berdasarkan target yang dibuat pada Perjanjian Kinerja Tahun 2024 yang telah disepakati. Penilaian ini dilakukan untuk mengevaluasi dan mengukur dalam rangka Pengumpulan Data Kinerja yang hasilnya memberikan gambaran keberhasilan dan kegagalan dalam Pencapaian Tujuan dan Sasaran Capaian Kinerja Kecamatan Tebing Tinggi Tahun 2024, sesuai dengan Rencana Strategis Kecamatan Tebing Tinggi 2021-2026. Hasil evaluasi terhadap Pelaksanaan Rencana Kerja (Renja) sampai dengan Triwulan II Tahun 2024 berdasarkan Target Indikator Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan tahun 2024 adalah sebagai berikut.

Kecamatan Tebing Tinggi pada Tahun 2024 melaksanakan 6 Program, 11 Kegiatan dan 25 Sub Kegiatan. Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan tersebut dilaksanakan dalam rangka terealisasinya Sasaran Strategis.

Berdasarkan hasil Evaluasi Rencana Kerja (Renja) sampai dengan Triwulan II, maka untuk Capaian Kinerjanya adalah 50,93%, sedangkan Realisasi Anggarannya adalah sebesar 58,27%. Uraian selengkapnya terkait Capaian Kinerja per indikator sampai dengan Bulan Juni 2024, adalah sebagai berikut :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota.
 - a. Kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah.
 - Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah.
Capaian Kinerjanya adalah sebesar 100% atau sebanyak 2 (Dua) dokumen dari Target Kinerja sebanyak 2 (dua) dokumen. Hal ini dikarenakan Dokumen Rencana Kerja

(Renja) Tahun 2025 sudah selesai disusun, sedangkan untuk Dokumen Rencana Kerja (Renja) Perubahan Tahun 2024 maupun masih dalam Tahap Penyusunan. Sedangkan untuk Realisasi Anggaran adalah sebesar Rp. 13.384.000,- atau sebesar 70%, dari Pagu Anggaran sebesar Rp. 19.230.000,-.

- Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD.

Capaian Kinerjanya adalah sebesar 50%. Hal ini dikarenakan Dokumen RKA-SKPD Tahun 2025 Sudah dientri pada Aplikasi SIPD-RI, begitupun dengan Dokumen RKA- SKPD Perubahan Tahun 2024 belum dientri pada Aplikasi SIPD. Sedangkan untuk Realisasi Anggaran adalah sebesar Rp. 11.169.000,- atau sebesar 61%, dari Pagu Anggaran sebesar Rp. 18.450.000,-.

- Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD.
Capaian Kinerjanya adalah sebesar 50%. Hal ini dikarenakan Dokumen DPA-SKPD Tahun 2024 Sudah dientri pada Aplikasi SIPD-RI dan sudah cetak, begitupun dengan Dokumen DPA- SKPD Perubahan Tahun 2024 belum dientri pada Aplikasi SIPD. Sedangkan untuk Realisasi Anggaran adalah sebesar Rp. 14.240.000,- atau sebesar 53%, dari Pagu Anggaran sebesar Rp. 26.736.000,-.

- Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD.
Capaian Kinerjanya adalah sebesar 100% atau sebanyak 2 (dua) laporan, dari Target Kinerja sebanyak 2 (dua) laporan. Hal ini dikarenakan Laporan Pengukuran Kinerja (LKIP) Tahun 2023 yang disampaikan ke Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Balangan dan Laporan Keuangan Unaudited Tahun 2023 yang disampaikan ke Bidang Akuntansi dan

Pertanggungjawaban BPKPAD Kabupaten Balangan sudah selesai disusun dan ditandatangani camat. Sedangkan untuk Realisasi Anggaran adalah sebesar Rp. 41.980.100,- atau sebesar 57%, dari Pagu Anggaran sebesar Rp. 74.135.000,-.

- b. Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah.
- Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN.
Capaian Kinerjanya adalah sebesar 100% atau sebanyak 15 Orang/Bulan dari Target Kinerja sebanyak 15 Orang/Bulan, hal ini dikarenakan Kecamatan Tebing Tinggi tidak mendapatkan Kuota PPPK pada Tahun 2024. Sedangkan untuk Realisasi Anggaran adalah sebesar Rp. 1.317.666.588,- atau sebesar 50%, dari Pagu Anggaran sebesar Rp. 2.649.800.447,-.
 - Sub Kegiatan Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD.
Capaian Kinerjanya adalah sebesar 50% atau sebanyak 6 (enam) dokumen dari Target Kinerja sebanyak 12 (dua belas) dokumen. Sedangkan untuk Realisasi Anggaran adalah sebesar Rp. 25.800.000,- atau sebesar 46%, dari Pagu Anggaran sebesar Rp 55.800.000 , -.
- c. Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah.
- Sub Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya.
Capaian Kinerjanya adalah sebesar 100% atau sebanyak 55 (lima puluh lima) paket dari Target Kinerja sebanyak 55 (lima puluh lima) paket. Sedangkan Realisasi Anggaran adalah sebesar Rp. 10.920.000,- atau sebesar 89% dari Pagu Anggaran sebesar Rp. 12.292.500,-.
- d. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah.

- Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor.
Capaian Kinerjanya adalah sebesar 17% atau sebanyak 2 (dua) paket dari Target Kinerja sebanyak 12 (dua belas) paket. Sedangkan Realisasi Anggaran adalah sebesar Rp. 0,- atau sebesar 0,00% dari Pagu Anggaran sebesar Rp. 9.510.800,-.
- Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor.
Capaian Kinerjanya adalah sebesar 100% atau sebanyak 8 (delapan) buah dari Target Kinerja sebanyak 8 (delapan) buah. Sedangkan Realisasi Anggaran adalah sebesar Rp. 151.151.000,- atau sebesar 76% dari Pagu Anggaran sebesar Rp. 197.830.000,-.
- Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor.
Capaian Kinerjanya adalah sebesar 50% atau sebanyak 6 (enam) paket dari Target Kinerja sebanyak 12 (dua belas) paket. Sedangkan Realisasi Anggaran adalah sebesar Rp. 21.023.400,- atau sebesar 60% dari Pagu Anggaran sebesar Rp 34.881.000,-.
- Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan.
Capaian Kinerjanya adalah sebesar 50% atau sebanyak 6 (enam) paket dari Target Kinerja sebanyak 12 (dua belas) paket. Sedangkan Realisasi Anggaran adalah sebesar Rp. 6.886.900,- atau sebesar 52% dari Pagu Anggaran sebesar Rp. 13.220.000,-.
- Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD.

Capaian Kinerjanya adalah sebesar 65% atau sebanyak 130 (seratus tiga puluh) laporan dari Target Kinerja sebanyak 200 (dua ratus) laporan. Sedangkan Realisasi Anggaran adalah sebesar Rp. 165.102.067,- atau sebesar 59% dari Pagu Anggaran sebesar Rp. 280.930.000,-.

e. Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah.

- Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat.

Capaian Kinerjanya adalah sebesar 50% atau sebanyak 6 (enam) bulan dari Target Kinerja sebanyak 12 (dua belas) bulan. Sedangkan Realisasi Anggaran adalah sebesar Rp. 38.976.000,- atau sebesar 49% dari Pagu Anggaran sebesar Rp. 80.043.500,-.

- Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik.

Capaian Kinerjanya adalah sebesar 50% atau sebanyak 6 (enam) laporan dari Target Kinerja sebanyak 12 (dua belas) laporan. Sedangkan Realisasi Anggaran adalah sebesar Rp 11.653.641,- atau sebesar 39% dari Pagu Anggaran sebesar Rp. 29.999.950,-.

- Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor.

Capaian Kinerjanya adalah sebesar 50% atau sebanyak 6 (enam) laporan dari Target Kinerja sebanyak 12 (dua belas) laporan. Sedangkan Realisasi Anggaran adalah sebesar Rp. 36.546.000,- atau sebesar 48% dari Pagu Anggaran sebesar Rp. 76.380.000,-.

f. Kegiatan Pemeliharaan Barang milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah.

- Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas

atau Kendaraan Dinas Jabatan.

Capaian Kinerjanya adalah sebesar 58% atau sebanyak 7 (tujuh) unit dari Target Kinerja sebanyak 12 (dua belas) unit. Sedangkan Realisasi Anggaran adalah sebesar Rp. 40.279.000,- atau sebesar 46% dari Pagu Anggaran sebesar Rp. 87.884.150,-.

- Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya.

Capaian Kinerjanya adalah sebesar 33% atau sebanyak 4 (empat) unit dari Target Kinerja sebanyak 12 (dua belas) unit. Sedangkan Realisasi Anggaran adalah sebesar Rp. 4.470.000,- atau sebesar 35% dari Pagu Anggaran sebesar Rp. 12.670.000,-.

- Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya.

Capaian Kinerjanya adalah sebesar 50% atau sebanyak 6 (enam) bulan dari Target Kinerja sebanyak 12 (dua belas) bulan. Sedangkan Realisasi Anggaran adalah sebesar Rp 18.000.000,- atau sebesar 45,40% dari Pagu Anggaran sebesar Rp. 36.000.000,-.

2. Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik.

a. Kegiatan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat.

- Sub Kegiatan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan . Capaian Kinerjanya adalah sebesar 50% atau sebanyak 6 (enam) laporan dari Target Kinerja sebanyak 12 (dua belas) laporan. Sedangkan untuk Realisasi Anggaran adalah sebesar Rp. 29.400.000,- atau sebesar 45%, dari Pagu Anggaran

sebesar Rp. 65.979.000,-.

3. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan.
 - a. Kegiatan Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa.
 - Sub Kegiatan Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan. Capaian Kinerjanya adalah sebesar 58% atau sebanyak 7 (tujuh) laporan dari Target Kinerja sebanyak 12 (dua belas) laporan. Sedangkan untuk Realisasi Anggaran adalah sebesar Rp. 267.222.700,- atau sebesar 27%, dari Pagu Anggaran sebesar Rp. 71.385.000,-.
 - b. Kegiatan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan
 - Sub Kegiatan Penumbuhan dan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Keterlibatan Perencanaan Kehidupan Menuju Keluarga Berkualitas
Capaian Kinerjanya adalah sebesar 60% atau sebanyak 15 Keluarga dari Target Kinerja sebanyak 15 Keluarga. Sedangkan untuk Realisasi Anggaran adalah sebesar Rp. 38.880.000,- atau sebesar 33%, dari Pagu Anggaran sebesar Rp 116.159.600,-.

4. Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum.
 - a. Kegiatan Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum.
 - Sub Kegiatan Sinergitas dengan Kepolisian Negara

Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan.

Capaian Kinerjanya adalah sebesar 50% atau sebanyak 1 (satu) laporan dari Target Kinerja sebanyak 2 (dua) laporan. Sedangkan untuk Realisasi Anggaran adalah sebesar Rp. 26.179.100,- atau sebesar 36%, dari Pagu Anggaran sebesar Rp. 72.810.000,-.

5. Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum.
 - a. Kegiatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah.
 - Sub Kegiatan Pelaksanaan Semua Urusan Pemerintahan yang Bukan Merupakan Kewenangan Daerah dan Tidak Dilaksanakan oleh Instansi Vertikal.
Capaian Kinerjanya adalah sebesar 100% atau sebanyak 4 (empat) Dokumen dari Target Kinerja sebanyak 4 (empat) Dokumen. Sedangkan untuk Realisasi Anggaran adalah sebesar Rp. 69.400.200,- atau sebesar 29%, dari Pagu Anggaran sebesar Rp. 243.147.200 ,-.
6. Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa.
 - a. Kegiatan Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa.
 - Sub Kegiatan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa.
Capaian Kinerjanya adalah sebesar 100% atau sebanyak 12 (dua belas) desa dari Target Kinerja sebanyak 12 (dua belas) desa. Sedangkan untuk Realisasi Anggaran adalah sebesar Rp. 42.949.100,- atau sebesar 17%, dari Pagu Anggaran sebesar Rp. 250.145.700,-.
 - Sub Kegiatan Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Partisipatif.
Capaian Kinerjanya adalah sebesar 100% atau 1 (satu) dokumen dari Target Kinerja sebanyak 1 (satu) dokumen.

Sedangkan untuk Realisasi Anggaran adalah sebesar Rp. 32.100.000,- atau sebesar 41%, dari Pagu Anggaran sebesar Rp. 77.847.600,-.

Evaluasi Rencana Kerja (Renja) Kecamatan Tebing Tinggi Tahun 2024 sebagaimana penjelasan di atas, dapat juga dilihat pada tabel berikut ini :

**FORMULIR HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH KABUPATEN BALANGAN
KECAMATAN TEBING TINGGI
TRIWULAN II TAHUN 2024**

No	Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output) / Sub Kegiatan (Sub Output)	Target Renstra Perangkat Daerah Kabupaten Pada Tahun 2026 Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah		Realisasi Capaian Kinerja Perangkat Daerah Kabupaten Sampai Dengan Tahun Lalu (2023)		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Kabupaten Tahun Berjalan 2024 yang		Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja SKPD 2024 yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2024	
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	I	II	K	Rp	K	Rp
1	2	3	4	5		6		7		8		9		12		13=12/7x100%	
1	7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	70.4 Nilai	18.422.556.959	67.2 Nilai	3.061.971.052	70.4 Nilai	3.715.793.347	66.75 Nilai	572.773.613	66.75 Nilai	1.929.247.696	66.75 Nilai	1.929.247.696	94.82	51.92
1	2.15.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Tersedianya dokumen perencanaan, penganggaran dan Evaluasi Perangkat Daerah Yang disampaikan Tepat Waktu	100 %	166.546.710	100 %	89.084.300	100 %	138.551.000	2 %	3.400.000	59 %	80.773.100	59 %	98.522.100	59	71.11
1	2.15.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan SKPD	12 Dokumen	23.268.300	3 Dokumen	7.132.900	2 Dokumen	19.230.000	0 Dokumen	0	2 Dokumen	13.384.000	2 Dokumen	14.009.000	100	72.85
2	2.15.01.2.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	12 Dokumen	22.324.500	0 Dokumen	0	2 Dokumen	18.450.000	0 Dokumen	0	1 Dokumen	11.169.000	1 Dokumen	14.259.000	50	77.28
3	2.15.01.2.01.04	Koordinasi dan Penyusunan DPA SKPD	Jumlah dokumen DPA - SKPD	12 Dokumen	31.250.560	2 Dokumen	6.119.500	2 Dokumen	26.736.000	0 Dokumen	0	1 Dokumen	14.240.000	1 Dokumen	24.874.000	50	93.04
4	2.15.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	12 Dokumen	89.703.350	2 Dokumen	75.831.900	2 Dokumen	74.135.000	1 Dokumen	3.400.000	1 Dokumen	41.980.100	1 Dokumen	45.380.100	50	61.21
2	2.15.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Terlaksananya administrasi keuangan perangkat daerah sesuai peraturan yang berlaku	100 %	15.057.535.394	100 %	2.257.545.797	100 %	2.705.600.447	19 %	516.518.203	50 %	1.343.466.588	50 %	1.517.584.760	50	56.09
5	2.15.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	25 orang	14.822.127.394	15 orang	2.206.905.797	15 orang	2.649.800.447	15 orang	512.218.203	15 orang	1.317.666.588	15 orang	1.485.624.760	100	56.07
6	2.15.01.2.02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	48 Dokumen	235.408.000	12 Dokumen	50.640.000	12 Dokumen	55.800.000	1 Dokumen	4.300.000	3 Dokumen	25.800.000	3 Dokumen	31.960.000	25	57.28
3	2.15.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Terlaksananya administrasi kepegawaian perangkat daerah sesuai peraturan yang berlaku	100 %	107.500.000	100 %	20.000.000	100 %	12.292.500	0 %	0	100 %	10.920.000	100 %	10.920.000	100	88.83
7	2.15.01.2.05.02	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	157 Paket	107.500.000	47 Paket	20.000.000	55 Paket	12.292.500	0 Paket	0	55 Paket	10.920.000	55 Paket	10.920.000	100	88.83
4	2.15.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terlaksananya administrasi umum perangkat daerah sesuai peraturan yang berlaku	100 %	1.936.552.340	100 %	277.241.795	100 %	536.371.800	6 %	32.388.199	64 %	344.163.367	64 %	401.471.850	64	74.85
8	2.15.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	49 Paket	38.535.780	1 Paket	2.250.000	12 Paket	9.510.800	0 Paket	0	0 Paket	0	0 Paket	0	0	0
9	2.15.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Ketersediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	28 buah	239.613.000	2 buah	4.264.000	8 buah	197.830.000	0 buah	0	8 buah	151.151.000	8 buah	151.151.000	100	76.4
10	2.15.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Alat Tulis Kantor yang disediakan, Jumlah Makanan dan Minuman yang disediakan	72 Paket	232.920.860	12 Paket	42.723.400	12 Paket	34.881.000	0 Paket	0	5 Paket	21.023.400	5 Paket	27.692.333	41.67	79.39

11	2.15.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah paket Barang Cetak dan Penggandaan yang diadakan	72 Paket	78.385.400	12 Paket	11.182.500	12 Paket	13.220.000	2 Paket	500.000	6 Paket	6.886.900	6 Paket	11.628.900	50	87.96
12	2.15.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1028 Laporan	1.347.097.300	140 Laporan	216.821.895	200 Laporan	280.930.000	15 Laporan	31.888.199	130 Laporan	165.102.067	130 Laporan	210.999.617	65	75.11
5	2.15.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase unit pengadaan Barang Milik Daerah	100 %	197.802.080	100 %	125.401.500	0 %	0	0 %	0	0 %	0	0 %	0		
13	2.15.01.2.07.05	Pengadaan Mebel	Jumlah Pengadaan Mebeleur yang diadakan	18 buah	197.802.080	7 buah	55.100.000	0 buah	0	0 buah	0	0 buah	0	0 buah	0		
14	2.15.01.2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Pengadaan Peralatan dan mesin Lainnya yang diadakan	25 buah	0	15 buah	70.301.500	0 buah	0	0 buah	0	0 buah	0	0 buah	0		
6	2.15.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tersedianya jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	100 %	225.572.325	100 %	162.992.649	100 %	186.423.450	9 %	16.167.211	46 %	87.175.641	46 %	102.052.946	46	54.74
15	2.15.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Waktu Penyediaan Jasa Surat Menyurat	72 Bulan	96.852.635	12 Bulan	72.842.000	12 Bulan	80.043.500	3 Bulan	6.200.000	6 Bulan	38.976.000	6 Bulan	46.107.700	50	57.6
16	2.15.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	72 Laporan	36.299.890	12 Laporan	19.116.049	12 Laporan	29.999.950	1 Laporan	4.167.211	4 Laporan	11.653.641	4 Laporan	13.599.246	33.33	45.33
17	2.15.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	72 Laporan	92.419.800	12 Laporan	71.034.600	12 Laporan	76.380.000	1 Laporan	5.800.000	4 Laporan	36.546.000	4 Laporan	42.346.000	33.33	55.44
7	2.15.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah yang terpelihara	100 %	731.048.110	100 %	129.705.011	100 %	136.554.150	3 %	4.300.000	46 %	62.749.000	46 %	80.254.125	46	58.77
18	2.15.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	76 unit	514.697.410	14 unit	87.917.011	12 unit	87.884.150	1 unit	1.300.000	7 unit	40.279.000	7 unit	53.799.000	58.33	61.22
19	2.15.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah unit Pemeliharaan Peralatan Mesin Kantor	75 Unit	15.330.700	12 Unit	5.788.000	12 Unit	12.670.000	0 Unit	0	4 Unit	4.470.000	6 Unit	5.455.125	50	43.06
20	2.15.01.2.09.10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Pemeliharaan/Rehabilitasi sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	12 bulan	38.625.000	12 bulan	36.000.000	0 bulan	0	0 bulan	0	0 bulan	0	0 bulan	0		
21	2.15.01.2.09.11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor yang mendapat Pemeliharaan Rutin/Berkala	60 bulan	162.395.000	0 bulan	0	12 bulan	36.000.000	1 bulan	3.000.000	6 bulan	18.000.000	7 bulan	21.000.000	58.33	58.33
2	7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	1 Laporan	79.834.590	100 Laporan	63.960.000	1 Laporan	65.979.000	0 Laporan	4.500.000	0 Laporan	29.400.000	0 Laporan	29.400.000	0	44.56
8	7.01.02.2.04	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Tercapainya Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat yang ditargetkan terhadap Pelayanan Terpadu Kecamatan	88 Nilai	79.834.590	83.4 Nilai	63.960.000	87.5 Nilai	65.979.000	0 Nilai	4.500.000	87.67 Nilai	29.400.000	87.67 Nilai	36.700.000	100.19	55.62
22	7.01.02.2.04.0003	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	72 Laporan	79.834.590	12 Laporan	63.960.000	12 Laporan	65.979.000	1 Laporan	4.500.000	6 Laporan	29.400.000	7 Laporan	36.700.000	58.33	55.62

3	7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Jumlah Laporan Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	1 Laporan	425.067.116	100 Laporan	255.048.500	1 Laporan	383.382.300	0 Laporan	25.000.000	0 Laporan	110.265.000	0 Laporan	110.265.000	0	28.76
9	7.01.03.2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Persentase pelaksanaan kegiatan pemberdayaan desa	100 %	284.514.000	100 %	184.664.000	100 %	267.222.700	8 %	22.400.000	26 %	71.385.000	26 %	187.218.000	26	70.06
23	7.01.03.2.01.0003	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	72 Laporan	284.514.000	12 Laporan	184.664.000	12 Laporan	267.222.700	1 Laporan	22.400.000	7 Laporan	71.385.000	8 Laporan	187.218.000	66.67	70.06
10	7.01.03.2.06	Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan	Persentase Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan	100 %	140.553.116	100 %	70.384.500	100 %	116.159.600	2 %	2.600.000	33 %	38.880.000	33 %	49.245.000	33	42.39
24	7.01.03.2.06.0012	Penumbuhan dan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Keterlibatan Perencanaan Kehidupan Menuju Keluarga	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan dan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Keterlibatan Perencanaan Kehidupan Menuju Keluarga	72 Keluarga	140.553.116	12 Keluarga	70.384.500	25 Keluarga	116.159.600	1 Keluarga	2.600.000	15 Keluarga	38.880.000	15 Keluarga	49.245.000	60	42.39
4	7.01.04	PROGRAM KOORDINASI KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Jumlah Laporan Koordinasi Ketenteraman dan Ketertiban Umum	1 Laporan	88.100.100	100 Laporan	45.798.000	1 Laporan	72.810.000	0 Laporan	3.000.000	0 Laporan	26.179.100	0 Laporan	26.179.100	0	35.96
11	7.01.04.7.03	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Terlaksananya penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum	100 %	88.100.100	100 %	45.798.000	100 %	72.810.000	4 %	3.000.000	36 %	26.179.100	36 %	29.919.100	36	41.09
25	7.01.04.7.03.0001	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah	8 Laporan	88.100.100	2 Laporan	45.798.000	2 Laporan	72.810.000	1 Laporan	3.000.000	1 Laporan	26.179.100	2 Laporan	29.919.100	100	41.09
5	7.01.05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	1 Laporan	1.355.313.632	100 Laporan	134.004.200	1 Laporan	243.147.200	0 Laporan	6.600.000	0 Laporan	69.400.200	0 Laporan	69.400.200	0	28.54
12	7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	Persentase penyelenggaraan urusan pemerintahan umum kecamatan Tebing Tinggi	100 %	1.355.313.632	100 %	134.004.200	100 %	243.147.200	3 %	6.600.000	29 %	69.400.200	29 %	119.595.200	29	49.19
26	7.01.05.2.01.0007	Pelaksanaan Semua Urusan Pemerintahan yang Bukan Merupakan Kewenangan Daerah dan Tidak Dilaksanakan oleh	Jumlah Dokumen Semua Urusan Pemerintahan yang Bukan Merupakan Kewenangan Daerah dan Tidak Dilaksanakan oleh Instansi Vertikal	25 Dokumen	1.355.313.632	4 Dokumen	134.004.200	4 Dokumen	243.147.200	1 Dokumen	6.600.000	4 Dokumen	69.400.200	4 Dokumen	119.595.200	100	49.19
6	7.01.06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Jumlah Laporan Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	1 Laporan	395.871.900	100 Laporan	143.328.000	1 Laporan	327.993.300	0 Laporan	17.800.000	0 Laporan	75.049.100	0 Laporan	75.049.100	0	22.88
13	7.01.06.2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase desa dengan administrasi pencatatan pengelolaan keuangan desa sesuai aturan	100 %	395.871.900	100 %	143.328.000	100 %	327.993.300	5 %	17.800.000	22 %	75.049.100	22 %	120.952.810	22	36.88
27	7.01.06.2.01.0003	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Persentase desa dengan administrasi pencatatan pengelolaan keuangan desa lengkap, Persentase desa dengan pencatatan aset desa sesuai	72 Bulan	302.676.300	12 Bulan	72.480.000	12 Bulan	250.145.700	1 Bulan	3.200.000	6 Bulan	42.949.100	7 Bulan	81.518.810	58.33	32.59
28	7.01.06.2.01.0013	Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Partisipatif	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Perencanaan Pembangunan Partisipatif	6 Dokumen	93.195.600	1 Dokumen	70.848.000	1 Dokumen	77.847.600	1 Dokumen	14.600.000	1 Dokumen	32.100.000	1 Dokumen	39.434.000	100	50.66

BAB III
RENCANA PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN DALAM
PERUBAHAN RENCANA KERJA

A. Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan dan Perubahannya

Sebagaimana telah disampaikan pada Bab II di atas, bahwa dalam Rencana Kerja (Renja) Tahun 2024 Kecamatan Tebing Tinggi melaksanakan 6 Program, 12 Kegiatan dan 25 Sub Kegiatan. Pada Rencana Kerja Perubahan (Renja-P) ada tambahan 1 (satu) Kegiatan dan 1 (satu) Sub Kegiatan pada Program Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota, yaitu Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah. Dengan Sub Kegiatan yaitu Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan.

Penambahan 1 (satu) Kegiatan dan 1 (satu) Sub Kegiatan dimaksud diharapkan dapat meningkatkan Semangat Kerja Aparatur Kecamatan Tebing Tinggi, sehingga target-target yang telah ditetapkan baik itu Indikator Kinerja Utama maupun Indikator Kinerja dapat tercapai.

Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan dalam Perubahan Rencana Kerja (Renja) Kecamatan Tebing Tinggi Tahun 2024, dapat dilihat pada tabel berikut ini :

**PERUBAHAN RENCANA KERJA SATUAN PERANGKAT DAERAH KECAMATAN TEBING TINGGI KAB. BALANGAN
TAHUN 2024**

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN									
				TARGET 2024		ANGGARAN		Bertambah/Berkurang (10-11)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS		
				SEBELUM	SESUDAH	SEBELUM	SESUDAH				NASIONAL	DAERAH	
1	2	3	4	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
		KECAMATAN TEBING TINGGI				4.809.105.147,00	5.834.654.447,00	1.025.549.300,00					
7		UNSUR KEWILAYAHAN				4.809.105.147,00	5.834.654.447,00	1.025.549.300,00					
	7.01	KECAMATAN				4.809.105.147,00	5.834.654.447,00	1.025.549.300,00					
1)	7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	74,40 (BB) Nilai	70,40 Nilai	3.715.793.347,00	4.719.879.847,00	1.004.086.500,00					
I.	7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	<i>Terlaksananya Penyusunan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</i>	100 Persen	100 %	138.551.000,00	153.915.000,00	15.364.000,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik
1	7.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	<i>Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah</i>	1 Dokumen	1 Dokumen	19.230.000,00	22.617.000,00	3.387.000,00	Kab. Balangan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik
2	7.01.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	<i>Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD</i>	4 Dokumen	2 Dokumen	18.450.000,00	18.450.000,00	0,00	Kab. Balangan, Tebing Tinggi, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik
3	7.01.01.2.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	<i>Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD</i>	4 Dokumen	2 Dokumen	26.736.000,00	26.736.000,00	0,00	Kab. Balangan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik
4	7.01.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	<i>Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD</i>	4 Laporan	2 Laporan	74.135.000,00	86.112.000,00	11.977.000,00	Kab. Balangan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik

II.	7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Terlaksananya Pelayanan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	2 Laporan	100 %	2.705.600.447,00	2.717.960.947,00	12.360.500,00			Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik
5	7.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	15/14 Orang/bulan	15 Orang/bulan	2.649.800.447,00	2.658.648.787,00	8.848.340,00	Kab. Balangan, Tebing Tinggi, Semua Kel/Desa Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik
6	7.01.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12 Dokumen	12 Dokumen	55.800.000,00	59.312.160,00	3.512.160,00	Kab. Balangan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik
III.	7.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Terlaksananya Pelayanan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	100 Persen	100 %	12.292.500,00	58.492.000,00	46.199.500,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik
7	7.01.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	55 Paket	106 Paket	12.292.500,00	58.492.000,00	46.199.500,00	Kab. Balangan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik
IV.	7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terlaksananya Pelayanan Administrasi Umum Perangkat Daerah	13.093 buah	100 %	536.371.800,00	823.453.200,00	287.081.400,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik
8	7.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	9.510.800,00	9.510.800,00	0,00	Kab. Balangan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik
9	7.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	10 Paket	197.830.000,00	394.270.100,00	196.440.100,00	Kab. Balangan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik
10	7.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	34.881.000,00	66.812.400,00	31.931.400,00	Kab. Balangan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik

11	7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	<i>Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan</i>	1 Paket	2 Paket	13.220.000,00	22.837.900,00	9.617.900,00	Kab. Balangan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik
12	7.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	<i>Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD</i>	150 Laporan	200 Laporan	280.930.000,00	330.022.000,00	49.092.000,00	Kab. Balangan, Tebing Tinggi, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik
V.	7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	<i>Terlaksananya Pelayanan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah</i>	-	100 %	0,00	549.803.000	549.803.000,00			Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik
13	7.01.01.2.07.0001	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	<i>Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan</i>	-	8 Unit	0,00	549.803.000,00	549.803.000,00	Kab. Balangan, Tebing Tinggi, Tebing Tinggi	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik
VI.	7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	<i>Terlaksananya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Perangkat Daerah</i>	36 Bulan	100 %	186.423.450,00	192.647.200,00	6.223.750,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik
14	7.01.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	<i>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat</i>	12 Laporan	12 Laporan	80.043.500,00	78.368.500,00	-1.675.000,00	Kab. Balangan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik
15	7.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	<i>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan</i>	12 Laporan	12 Laporan	29.999.950,00	29.730.000,00	-269.950,00	Kab. Balangan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik
16	7.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	<i>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan</i>	12 Laporan	12 Laporan	76.380.000,00	84.548.700,00	8.168.700,00	Kab. Balangan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik

VII.	7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	<i>Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Perangkat Daerah</i>	100 Persen	100 %	136.554.150,00	223.608.500,00	87.054.350,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik
17	7.01.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	<i>Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya</i>	15 Unit	15 Unit	87.884.150,00	156.470.100,00	68.585.950,00	Kab. Balangan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik
18	7.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	<i>Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara</i>	10 Unit	12 Unit	12.670.000,00	21.440.000,00	8.770.000,00	Kab. Balangan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik
19	7.01.01.2.09.0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	<i>Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi</i>	3 Unit	3 Unit	36.000.000,00	45.698.400,00	9.698.400,00	Kab. Balangan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik
2)	7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang Disusun Tepat Waktu dan sesuai SOP	90 Nilai	1 Laporan	65.979.000,00	68.979.000,00	3.000.000,00				
VIII.	7.01.02.2.04	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	<i>Terselenggaranya Pelayanan di Tingkat Kecamatan sesuai dengan Standar Pelayanan</i>	85 Persen	100 %	65.979.000,00	68.979.000,00	3.000.000,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik
20	7.01.02.2.04.0003	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	<i>Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan</i>	12 Laporan	12 Laporan	65.979.000,00	68.979.000,00	3.000.000,00	Kab. Balangan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik

3)	7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Jumlah Laporan Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan yang Disusun Tepat Waktu dan sesuai SOP	100 %	1 Laporan	383.382.300,00	403.280.600,00	19.898.300,00				
IX.	7.01.03.2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	<i>Terselenggaranya Pemberdayaan Masyarakat di Tingkat Kecamatan</i>	-	100 %	267.222.700,00	267.121.000,00	-101.700,00			Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik
21	7.01.03.2.01.0003	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	<i>Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan</i>	12 Laporan	12 Laporan	267.222.700,00	267.121.000,00	-101.700,00	Kab. Balangan, Tebing Tinggi, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik
X.	7.01.03.2.06	Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan	<i>Terselenggaranya Pemberdayaan Masyarakat di Tingkat Kecamatan</i>	-	100 %	116.159.600,00	136.159.600,00	20.000.000,00			Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik
22	7.01.03.2.06.0012	Penumbuhan dan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Keterlibatan Perencanaan Kehidupan Menuju Keluarga Berkualitas	<i>Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan dan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Keterlibatan Perencanaan Kehidupan Menuju Keluarga Berkualitas</i>	20 Keluarga	25 Keluarga	116.159.600,00	136.159.600,00	20.000.000,00	Kab. Balangan, Tebing Tinggi, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik
4)	7.01.04	PROGRAM KOORDINASI KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Jumlah Laporan Koordinasi Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang Disusun Tepat Waktu dan sesuai SOP	-	1 Laporan	72.810.000,00	123.381.300,00	50.571.300,00				
XI.	7.01.04.2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	<i>Terselenggaranya Ketenteraman dan Ketertiban Umum di Tingkat Kecamatan</i>	-	100 %	72.810.000,00	123.381.300,00	50.571.300,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik
23	7.01.04.2.01.0001	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	<i>Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan</i>	12 Laporan	12 Laporan	72.810.000,00	123.381.300,00	50.571.300,00	Kab. Balangan, Tebing Tinggi, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik

5)	7.01.05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum yang Disusun Tepat Waktu dan Sesuai SOP	100 %	1 Laporan	243.147.200,00	237.839.300,00	-5.307.900,00				
XII.	7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	Terselenggaranya Kegiatan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	-	100 %	243.147.200,00	237.839.300,00	-5.307.900,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik
24	7.01.05.2.01.0007	Pelaksanaan Semua Urusan Pemerintahan yang Bukan Merupakan Kewenangan Daerah dan Tidak Dilaksanakan oleh Instansi Vertikal	Jumlah Dokumen Semua Urusan Pemerintahan yang Bukan Merupakan Kewenangan Daerah dan Tidak Dilaksanakan oleh Instansi Vertikal	12 Dokumen	4 Dokumen	243.147.200,00	237.839.300,00	-5.307.900,00	Kab. Balangan, Tebing Tinggi, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik
6)	7.01.06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Jumlah Laporan Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa yang Disusun Tepat Waktu dan sesuai SOP	100 %	1 Laporan	327.993.300,00	281.294.400,00	-46.698.900,00				
XIII.	7.01.06.2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Terselenggaranya Pembinaan dan Pengawasan Kegiatan Pemerintahan Desa		100 %	327.993.300,00	281.294.400,00	-46.698.900,00			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik
25	7.01.06.2.01.0003	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	24 Dokumen	12 Dokumen	250.145.700,00	213.976.800,00	-36.168.900,00	Kab. Balangan, Tebing Tinggi, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik
26	7.01.06.2.01.0013	Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Partisipatif	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Perencanaan Pembangunan Partisipatif	24 Dokumen	1 Dokumen	77.847.600,00	67.317.600,00	-10.530.000,00	Kab. Balangan, Tebing Tinggi, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik
J U M L A H						4.809.105.147,00	5.834.654.447,00	1.025.549.300,00				

Terkait adanya Penambahan Kegiatan dan Sub Kegiatan (sebagaimana dapat dilihat pada tabel di atas), maka untuk lebih jelasnya dapat kami sampaikan sebagai berikut :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota.
 - a. Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah.
 - Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah.
Pagu Anggaran Murni untuk Sub Kegiatan ini adalah sebesar Rp. Rp19.230.000,-, selanjutnya ada Penambahan Pagu Anggaran sebesar Rp. Rp3.387.000,-. dengan tujuan untuk Peningkatan Frekuensi Rapat Dokumen Perencanaan.
 - Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD.
Pagu Anggaran Murni untuk Sub Kegiatan ini adalah sebesar Rp. Rp74.135.000,-, selanjutnya ada Penambahan Pagu Anggaran sebesar Rp. Rp11.977.000,- adanya penambahan anggaran untuk perjalanan dinas untuk meningkatkan kualitas dalam penyusunan LKIP.
 - b. Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah.
 - Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN.
Pagu Anggaran Murni untuk Sub Kegiatan ini adalah sebesar Rp. 2.573.309.165,-, selanjutnya ada Penambahan Pagu Anggaran sebesar Rp. 76.491.282,-. Hal ini diakibatkan terjadinya kekurangan Anggaran pada rekening Belanja tunjangan PPh PNS sehingga pada saat Pergeseran 1 mengalami penambahan dan pada Perubahan juga

terjadi penambahan Anggaran dan penyesuaian Pada Item Tambahan Penghasial Pegawai sebesar Rp. 8.848.340, . Total Anggaran Pada Sub Kegiatan ini setelah pergeseran dan perubahan menjadi Rp2.658.648.787,-.

- Sub Kegiatan Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD.

Pagu Anggaran Murni untuk Sub Kegiatan ini adalah sebesar Rp. 55.800.000,-, selanjutnya ada Penambahan Pagu Anggaran sebesar Rp. 3.512.160,- dengan tujuan untuk pemabayaran iuran Jaminan Kecelakaan Kerja Non-ASN dan Jaminan Kematian Non-ASN.

c. Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah.

- Sub Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya.

Pagu Anggaran Murni untuk Sub Kegiatan ini adalah sebesar Rp 12.292.500,-, selanjutnya ada penambahan Pagu Anggaran sebesar Rp 46.199.500,-. Adanya penambahan Pagu Anggaran untuk Pengadaan PDH dan PSR.

d. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah.

- Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor.

Pagu Anggaran Murni untuk Sub Kegiatan ini adalah sebesar Rp. 197.830.000,-, selanjutnya ada penambahan Pagu Anggaran sebesar Rp. 196.440.100,- adanya penambahan Pagu anggaran guna untuk prasaran kantor seperti Penambahan Laptop, PC, Printer dan Meja Rapat, Meja Panjang Aula, Meja dan Kursi Camat & Sekcam, Kursi tamu,

Dispenser.

- Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor.
Pagu Anggaran Murni untuk Sub Kegiatan ini adalah sebesar Rp. 34.881.000,-, selanjutnya ada Penambahan Pagu Anggaran sebesar Rp. 31.931.400,- dengan tujuan untuk Peningkatan Frekuensi Rapat, makan minum jamuan tamu, atk, materai.

- Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan.

Pagu Anggaran Murni untuk Sub Kegiatan ini adalah sebesar Rp. Rp13.220.000,-, selanjutnya ada Penambahan Pagu Anggaran sebesar Rp. 9.617.900,- dengan adanya penambahan volume cetak map dinas, cetak fotokopi, lembar kwitansi dan lembar disposisi.

- Sub Kegiatan Penyelenggaran Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD.

Pagu Anggaran Murni untuk Sub Kegiatan ini adalah sebesar Rp. 280.930.000,-, selanjutnya ada Penambahan Pagu Anggaran sebesar Rp. 49.092.000,- dengan tujuan untuk Peningkatan Frekuensi perjalanan dinas Koordinasi dan Konsultasi.

e. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah.

- Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan.

Sub Kegiatan ini baru dimasukkan pada Rencana Kerja Perubahan (Renja-P), adapun maksud dan tujuannya adalah untuk lebih meningkatkan Mobilitas Aparatur.

f. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah.

- Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat.

Pagu Anggaran Murni untuk Sub Kegiatan ini adalah sebesar Rp. 80.043.500,-, selanjutnya ada Pengurangan Pagu Anggaran sebesar Rp .1.675.000,-, hal ini disebabkan batalnya Belanja salah satu item ATK.

- Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik.

Pagu Anggaran Murni untuk Sub Kegiatan ini adalah sebesar Rp. 29.999.950,-, selanjutnya ada Pengurangan Pagu Anggaran sebesar Rp. 269.950,-, hal ini disebabkan batalnya Belanja Belanja Langganan Internet karena Indihome belum ada jalur fiber optiknya di wilayah Kecamatan.

- Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor.

Pagu Anggaran Murni untuk Sub Kegiatan ini adalah sebesar Rp. 76.380.000,-, selanjutnya ada Penambahan Pagu Anggaran sebesar Rp 8.168.700,- akibat adanya Penambahan Volume THL Petugas Kebersihan 1 orang.

g. Kegiatan Pemeliharaan Barang milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah.

- Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan.

Pagu Anggaran Murni untuk Sub Kegiatan ini adalah sebesar Rp. 87.884.150,-, selanjutnya ada Penambahan Pagu Anggaran sebesar Rp.

68.585.950,- untuk menambah Anggaran Belanja Bahan Bakar Mobil Dinas dan Pemeliharaan.

- Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya.

Pagu Anggaran Murni untuk Sub Kegiatan ini adalah sebesar Rp. 12.670.000,-, selanjutnya ada Penambahan Pagu Anggaran sebesar Rp. 8.770.000,- untuk menambah Anggaran Belanja servie ac dan servie printer, laptop, komputer.

- Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya.

Pagu Anggaran Murni untuk Sub Kegiatan ini adalah sebesar Rp. 36.000.000,-, selanjutnya ada Penambahan Pagu Anggaran sebesar Rp. 9.698.400,- yang akan digunakan untuk Belanja cat dan tukang cat untuk pagar kantor.

2. Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik.

- a. Kegiatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan.

- Sub Kegiatan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan.

Pagu Anggaran Murni Sub Kegiatan ini adalah sebesar Rp. 65.979.000,-, selanjutnya ada Penambahan Pagu Anggaran sebesar

Rp. 3.000.000,- akibat adanya Penambahan Perjalanan Dinas Dalam Daerah.

3. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan.
 - a. Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa.
 - Sub Kegiatan Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan Pagu Anggaran Murni Sub Kegiatan ini adalah sebesar Rp. 267.222.700,-, selanjutnya ada Pengurangan Pagu Anggaran sebesar Rp. 101.700,- akibat adanya Batal Belanja Sewa yang di alihkan ke Perjalanan Dinas.
 - b. Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan.
 - Penumbuhan dan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Keterlibatan Perencanaan Kehidupan Menuju Keluarga Berkualitas.
Pagu Anggaran Murni Sub Kegiatan ini adalah sebesar Rp. 116.159.600,-, selanjutnya ada Penambahan Pagu Anggaran sebesar Rp.20.000.000,- dikarenakan penambahn untuk dekorasi stand pameran.
4. Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum.
 - a. Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum.
 - Sub Kegiatan Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan.
Pagu Anggaran Murni Sub Kegiatan ini adalah sebesar Rp. 72.810.000,-, selanjutnya ada

Penambahan Pagu Anggaran sebesar Rp. 50.571.300,- akibat adanya Penambahan BBM Mobil damkar dan honor jasa Pemadam kebakaran dan Belanja handy Talky.

5. Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum.
 - b. Kegiatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah.
 - Sub Kegiatan Pelaksanaan semua Urusan Pemerintahan yang bukan merupakan Kewenangan Daerah dan tidak dilaksanakan oleh Instansi Vertikal.

Pagu Anggaran Murni Sub Kegiatan ini adalah sebesar Rp. 243.147.200,-, selanjutnya ada Pengurangan Pagu Anggaran sebesar Rp. 5.307.900,- akibat adanya Penghapusan Belanja Pakaian Paskibra yang terdoble pada saat entry RKA.
6. Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa.
 - a. Kegiatan Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa.
 - Sub Kegiatan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa.

Pagu Anggaran Murni Sub Kegiatan ini adalah sebesar Rp. Rp250.145.700,-, selanjutnya ada Pengurangan Pagu Anggaran sebesar Rp. 36.168.900,- akibat adanya Batal pelaksanaan Wokrshop Pengelolaan Keuangan Desa karena sudah dilaksanakan melalui Badan Kerja Sama Desa.

- Sub Kegiatan Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Partisipatif.

Pagu Anggaran Murni Sub Kegiatan ini adalah sebesar Rp. 77.847.600,-, selanjutnya ada Pengurangan Pagu Anggaran sebesar Rp. 10.530.000,- akibat adanya Pengurangan Volume Makan dan Minum Rapat dan Perjalanan Dinas.

B. Analisis Dampak Sosial Ekonomi

Dengan dilaksanakannya seluruh Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan sebagaimana tercantum pada tabel di atas, diharapkan akan berdampak secara Sosial Ekonomi terhadap Masyarakat Kecamatan Tebing Tinggi. Khususnya untuk Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan yang menjadi pengampu dari Indikator Kinerja Utama (IKU) Kecamatan Tebing Tinggi. Indikator Kinerja Utama (IKU) Kecamatan Tebing Tinggi sebagaimana tercantum dalam Dokumen Penyesuaian Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2021-2026 adalah, sebagai berikut :

1. Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Pelayanan dan Kesejahteraan Sosial.
2. Jumlah Lembaga Kemasyarakatan Desa (LKD) yang Aktif.
3. Persentase Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum yang Ditangani.
4. Persentase Desa yang Tertib Administrasi Pemerintahan.
5. Persentase Desa yang Tertib Administrasi Keuangan.

Adapun Dampak Sosial Ekonomi yang diharapkan dapat dirasakan oleh Masyarakat Kecamatan Tebing Tinggi terkait Pelaksanaan Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan yang menjadi pengampu dari Indikator Kinerja Utama (IKU), adalah sebagai berikut :

- a. Sub Kegiatan yang mengampu ***Meningkatnya Fasilitasi Pelayanan Masyarakat*** yang merupakan Kinerja Utama dari Indikator Kinerja Utama (IKU) ***Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Pelayanan dan Kesejahteraan Sosial***, yaitu :
 - 1) Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan.

Kegiatan yang dilaksanakan pada Sub Kegiatan tersebut di antaranya adalah ; Fasilitasi Pelayanan Administrasi Kependudukan, Fasilitasi Pelayanan Bantuan Sosial.

Dengan terpenuhinya Fasilitasi Pelayanan Administrasi Kependudukan dan Fasilitasi Pelayanan Bantuan Sosial, maka secara **SOSIAL**, masyarakat merasakan hak-haknya sebagai warga negara telah dipenuhi oleh Pemerintah.

b. Sub Kegiatan yang mengampu **Meningkatnya Fasilitas Pemberdayaan Masyarakat** yang merupakan Kinerja Utama dari Indikator Kinerja Utama (IKU) **Jumlah Lembaga Kemasyarakatan Desa (LKD) yang Aktif**, yaitu :

- 1) Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan.
- 2) Penumbuhan dan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Keterlibatan Perencanaan Kehidupan Menuju Keluarga Berkualitas.

Kegiatan yang dilaksanakan pada Sub Kegiatan tersebut di antaranya adalah ; Rapat Koordinasi Rembug Stunting Tingkat Kecamatan, Kegiatan TP. PKK Kecamatan dan TP. PKK Desa dan Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan Desa (LKD), Kegiatan Penunjang (Seleksi MTQ Tingkat Kecamatan, Pengiriman Kafilah MTQ Tingkat Kabupaten, Fasilitas Safari Ramadhan).

Dengan menurunnya Angka Prevalensi Stunting, maka hal tersebut akan berdampak secara **SOSIAL**.

Kegiatan yang dilaksanakan oleh TP. PKK Kecamatan dan Desa yang berupa Pelatihan-Pelatihan Keterampilan akan berdampak secara **EKONOMI**.

Dengan semakin Meningkatnya Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan Desa (LKD), diharapkan akan berdampak secara **SOSIAL** terhadap para Anggota Lembaga Kemasyarakatan Desa (LKD) dimaksud.

c. Sub Kegiatan yang mengampu **Meningkatnya Ketentraman dan Ketertiban Umum di Wilayah Kecamatan** yang merupakan Kinerja Utama dari Indikator Kinerja Utama (IKU) Persentase Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum yang Ditangani, yaitu :

- 1) Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan.
- 2) Pelaksanaan semua Urusan Pemerintahan yang bukan merupakan Kewenangan Daerah dan tidak dilaksanakan oleh Instansi Vertikal.

Kegiatan yang dilaksanakan pada Sub Kegiatan tersebut di antaranya adalah ; Rapat Koordinasi Forum Pimpinan Kecamatan (Forkopimcam), Pembinaan Satuan Perlindungan Masyarakat (Satlinmas). Sosialiasi LPPDes/LKPPDes dan LEK BPD serta Kegiatan Penunjang (Perayaan Hari Jadi Kabupaten dan Perayaan HUT Kemerdekaan RI).

Seluruh kegiatan tersebut di atas bermuara pada 1 (satu) tujuan, yaitu Terciptanya Keamanan dan Ketertiban Umum. Sehingga dengan terciptanya keadaan tersebut pada Wilayah Kecamatan Tebing Tinggi, maka akan berdampak besar kepada masyarakat secara **SOSIAL DAN EKONOMI**.

- d. Sub Kegiatan yang mengampu **Meningkatnya Penyelenggaraan Pemerintahan Desa** yang merupakan Kinerja Utama dari Indikator Kinerja Utama (IKU) **Persentase Desa yang Tertib Administrasi Pemerintahan** dan **Persentase Desa yang Tertib Administrasi Keuangan**, yaitu :
- 1) Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa.
 - 2) Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Partisipatif.

Kegiatan yang dilaksanakan pada Sub Kegiatan tersebut di antaranya adalah ; Peningkatan Kapasitas Perangkat Desa dalam Pengelolaan Administrasi Pemerintahan dan Keuangan, Peningkatan Kapasitas

BPD, Fasilitasi Pembangunan Desa (Musrenbang Tingkat Kecamatan).

diharapkan akan berdampak secara **SOSIAL** terhadap Pemerintahan Desa dan warganya.

BAB IV

PENUTUP

Dengan adanya Perubahan Rencana Kerja (Renja) Kecamatan Tebing Tinggi Tahun 2024, yang selanjutnya akan dibarengi dengan perubahan produk turunannya yaitu Rencana Kerja dan Anggaran (RKA). Maka diharapkan dampaknya akan dirasakan, yaitu dengan semakin meningkatnya Semangat Kerja seluruh Aparatur Kecamatan Tebing Tinggi. Sehingga target-target yang telah ditetapkan, baik itu target pada Indikator Kinerja Utama (IKU) maupun pada Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan.

Tebing Tinggi, 01 Juli 2024

**CAMAT TEBING TINGGI**
NORSAMIDI, S.Kep
NIP. 19720606 199202 1 001